

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE

TERHADAP FUNGSI AUDIT INTERNAL

(Study kasus pada Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah di Indonesia)

Tesis

Program Magister Akuntansi



Diajukan oleh

Zahrina Nur Arifah

18919055

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

Maret 2021

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE

TERHADAP FUNGSI AUDIT INTERNAL

(Study kasus pada Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah di Indonesia)

Tesis

Program Magister Akuntansi



Diajukan oleh

Zahrina Nur Arifah

18919055

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

Maret 2021

Tesis

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP FUNGSI AUDIT INTERNAL

(Study kasus pada Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah di Indonesia)

Diajukan oleh

Zahrina Nur Arifah

18919055

telah disetujui oleh :

Yogyakarta, 13 Maret 2021

Dosen Pembimbing



Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Ec., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 13 Maret 2021

Zahrina Nur Arifah

MOTTO & PERSEMBAHAN

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Q.S Al Baqarah (2): 216)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S Al Insyirah (94): 5-8)”

Karya tulis ini dipersembahkan untuk:

Kedua orang tua yang sangat saya sanyangi, suami saya yang sangat saya cintai, saudara, dan orang-orang yang memberikan dukungan serta doa yang tidak putus.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 14 April 2021

Telah diterima dan disetujui dengan

baik oleh : Dosen Pembimbing

Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., SAS., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan S2 ini di Magister Akuntansi Program Pascasarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam kesempatan ini, tak lupa peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penelitian tesis ini.

Saya juga ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya, karya ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa atas kehendak dari Allah SWT dan pertolongan-Nya.
2. Direktur Program Magister dan Doktor Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Dr. Zainal Mustafa EQ., MM., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti.
3. Ketua Program Magister Akuntansi, Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com (IS), Ph.D, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti
4. Bapak Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Ayahanda Sangidu Sugiyono, Ibunda Jamidah serta Suamiku Efhan Tantra Sintara atas segala dukungan moral yang telah diberikan kepada peneliti selama proses penelitian, yang juga dengan sangat sabar memberikan semangat

kepada peneliti.

6. Kepada seluruh teman-teman Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia angkatan 18.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa adanya banyak kekurangan dari karya ilmiah ini yang berasal dari pribadi penulis. Oleh karena itu, penulis berhadap adanya saran dan kritik yang membangun untuk karya ilmiah ini untuk penyempurnaan di masa depan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 13 Maret 2021

Zahrina Nur Arifah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	4
MOTTO & PERSEMBAHAN	5
HALAMAN PENGESAHAN	6
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI.....	9
ABSTRAK.....	14
ABSTRACT	15
BAB I.....	16
PENDAHULUAN.....	16
1.1 Latar Belakang Masalah	16
1.2 Rumusan Masalah.....	20
1.3 Tujuan Penelitian	21
1.4 Manfaat Penelitian	22
1.5 Sistematika Penulisan	23
BAB II.....	24
KAJIAN PUSTAKA	24
2.1 Landasan Teori.....	24
2.1.1 Teori Keagenan.....	24
2.1.2 Corporate Governance.....	25
2.1.3 Islamic Corporate Governance	28
2.1.4 Dewan Pengawas Syariah	31
2.1.5 Dewan Direksi	33
2.1.6 Komite Audit.....	33

2.1.7 Fungsi Audit Internal.....	35
2.2 Penelitian Terdahulu.....	37
2.3 Kerangka Pemikiran.....	35
2.4 Hipotesis Penelitian.....	36
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41
3.1 Populasi & Sampel	41
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.3 Definisi Operasional Variabel serta Pengukuran Variabel Penelitian.....	45
3.3.1 Fungsi Audit Internal.....	45
3.3.2 Pengungkapan Islamic Corporate Governance.....	45
3.3.3 Dewan Pengawas Syariah	48
3.3.4 Komite Audit.....	49
3.3.5 Dewan Direksi	49
3.3.6 Ukuran Perusahaan.....	50
3.4 Pengujian Hipotesis.....	50
3.4.1 Uji Statistik Deskriptif	50
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	51
3.4.3 Regresi Linear Berganda	54
3.4.4 Uji Hipotesis	55
BAB IV	57
HASIL PENELITIAN.....	57
4.1 Statistik Deskriptif	57

4.2 Uji Asumsi Klasik.....	58
4.2.1 Uji Multikolinearitas	58
4.2.2 Uji Autokorelasi.....	59
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	60
4.2.4 Uji Normalitas.....	62
4.3 Pengujian Hipotesis.....	64
4.3.1 Koefisien Determinasi	64
4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	64
4.3.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)	65
4.4 Pembahasan	67
BAB V.....	70
KESIMPULAN & SARAN.....	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Implikasi Penelitian.....	70
5.3 Saran Penelitian.....	71
5.4 Keterbatasan Penelitian	72
DAFTAR REFERENSI	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	38
Table 3.1 Sampel Penelitian	42
Tabel 3.2 Indikator Pengungkapan Islamic Corporate Corporate Governance ...	47
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	57
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas	59
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi	60
Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokesdastisitas	62
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas	63
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi	64
Tabel 4.7 Hasil Uji F	65
Tabel 4.8 Hasil Uji t	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroekedastisitas	61
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas	62



ABSTRAK

Tata kelola perusahaan (corporate governance) merupakan dasar pedoman yang digunakan dalam menjalankan perusahaan. Menciptakan nilai tambah perusahaan untuk pihak yang berkepentingan (stakeholder) merupakan tujuan dari adanya Corporate Governance. Untuk menciptakan good corporate governance diperlukan audit internal yang berfungsi dengan baik. Penelitian ini akan membahas pengaruh corporate governance terhadap fungsi audit internal perbankan syariah dan unit usaha syariah. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengungkapan islami corporate governance, dewan pengawas syariah, komite audit, dewan direksi, sedangkan variabel dependen yaitu fungsi audit internal dengan menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bank umum syariah dan unit usaha syariah yang sudah terdaftar di otoritas jasa keuangan periode 2015-2019. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 bank umum syariah dan 19 unit usaha syariah di Indonesia periode 2015-2019. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengungkapan islami corporate governance, dewan pengawas syariah, dewan direksi, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap fungsi audit internal. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan yaitu dewan pengawas syariah dan dewan direksi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap fungsi audit internal. Variabel Pengungkapan Islami Corporate Governance, komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap fungsi audit internal.

Kata Kunci : Islami Corporate Governance, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi, Komite Audit, Fungsi Audit Internal

ABSTRACT

Corporate governance is the basic guideline used in running a company. Creating added corporate value for interested parties (stakeholders) is the goal of Corporate Governance. To create good corporate governance, a functioning internal audit is required. This study will discuss the influence of corporate governance on the internal audit function of Islamic banking and Islamic business units. The independent variable in this study is the disclosure of Islamic corporate governance, the sharia supervisory board, the audit committee, the board of directors, while the dependent variable is the internal audit function using the firm size control variable. The population used in this study is Islamic commercial banks and sharia business units that have been registered with the financial services authority for the 2015-2019 period. While the sample used in this study is 14 Islamic commercial banks and 19 Islamic business units in Indonesia for the 2015-2019 period. The analysis technique used in this research is descriptive statistical test, classical assumption test, multiple linear regression and hypothesis testing. The results show that simultaneously Islamic corporate governance disclosure, sharia supervisory board, board of directors, audit committee and company size have a significant effect on the internal audit function. Partially the results of the study show that the independent variables used, namely the sharia supervisory board and the board of directors, have a negative and significant effect on the internal audit function. Islamic Disclosure of Corporate Governance variables, audit committee and company size have no effect on the internal audit function.

Keywords: Islamic Corporate Governance, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, Audit Committee, Internal Audit Function

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agency problem merupakan permasalahan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan. Mengabaikan kepentingan pemegang saham, mungkin akan dilakukan oleh pihak manajemen yang mempunyai kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Konflik agensi timbul karena perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, hal tersebut terjadi karena kepentingan pribadi yang akan diutamakan oleh manajer, yang akan menyebabkan penambahan biaya, penurunan keuntungan dan memengaruhi harga saham sehingga akan menurunkan nilai perusahaan. (Jensen dan Meckling, 1976).

Audit Internal merupakan aspek penting yang harus ada dalam penerapan pengawasan pengoperasian perusahaan. Dalam Teori Agensi menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen yang mengelola perusahaan. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan adanya perbedaan tujuan yang dicapai pihak manajemen dapat bertolak belakang dengan tujuan pemilik perusahaan. Maka dari itu audit internal berfungsi untuk menjembatani perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, yaitu dengan mengawasi kinerja pihak manajemen dan menjadi penghubung untuk mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Fungsi Audit Internal berperan penting dalam Good Corporate Governance. Terdapat tiga aspek

yang harus dipenuhi untuk mewujudkan Good Corporate Governance yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Audit Internal dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi dan independensi dalam melakukan pengawasan kinerja perusahaan telah sama dengan standar peraturan yang telah ditetapkan.

Sektor perbankan islam mempunyai karakteristik yang lebih kompleks dari pada perusahaan sektor lain. Perbankan islam harus mengacu pada syariat islam yang sesuai dengan prinsip syariah. Dasar pedoman prinsip syariah yaitu ayat yang terkandung dalam Al Quran. Transaksi ataupun investasi yang dilakukan dalam bank syariah juga harus menerapkan prinsip syariah yang melarang adanya riba. Maka dari itu pengawasan pada perbankan syariah menjadi lebih rumit yaitu mengawasi tata kelola perusahaan dan memastikan seluruh kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam melakukan pengawasan ini Audit Internal dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu lembaga pengawas syariah yang berasal dari luar perusahaan yang fungsinya seperti Audit Eksternal.

Menurut Dwikusumowati dan Rahardjo (2013) dikarenakan menyangkut trik penyajian informasi, akuntansi selalu menarik untuk dijadikan isu bisnis. Akan selalu terjadi gap kepentingan dan memberikan celah untuk munculnya kecurangan dalam pengelolaan perusahaan. Tindakan penipuan merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Tindakan penipuan meliputi kebohongan, menyembunyikan kebenaran, dan kecurangan dan tindakan tersebut termasuk pada pelanggaran kepercayaan. Faktanya, skandal etika dalam dunia akuntansi itu terjadi begitu banyak. Salah satunya adalah kecurangan dalam praktik merupakan masalah krusial dan sensitif di kalangan profesi

Masih banyak pelaku bisnis maupun profesi akuntan yang melakukan penyimpangan etika demi kelancaran bisnisnya dan mengharapkan sebuah keuntungan secara singkat yang menghalalkan berbagai cara. Selain itu seorang profesi akuntan juga dapat melanggar kode etik profesi yang harus dipatuhi oleh seseorang demi kepentingan dirinya sendiri. Seperti salah satu kasus yang terjadi pada salah satu perbankan syariah yaitu Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah yang melakukan tindakan kecurangan pada periode tahun 2014-2016 dan mulai terdeteksi pada tahun 2018.

Kasus kredit fiktif yang melibatkan PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) Syariah ke PT Hatsuka Sarana Karya (HSK) perlahan mulai terungkap. Dugaan pihak kepolisian bahwa penyaluran kredit oleh anak perusahaan Bank BJB Syariah tersebut terbukti Bank BJB Syariah tidak memiliki jaminan dari kredit senilai Rp.548.000.000.000.

Sementara itu, kredit tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai Kredit Tanpa Agunan (KTA). Sesuai dengan manajemen risiko perbankan, Kredit Tanpa Agunan (KTA) disalurkan hanya berkisar Rp. 250.000.000 hingga 350.000.000. PT Hatsuka Sarana Karya (HSK) selaku debitur justru mengagunkan tanah induk dan bangunan ruko di Garut Super Blok tersebut ke bank lain, yakni Bank Muamalat. Informasi yang diperoleh menyebutkan Bank Muamalat telah menyalurkan kredit Bank BJB Syariah telah melakukan tindakan, yakni audit khusus terkait kasus tersebut. Hasil audit itu kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti dan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yocie Gusman diduga tidak menaati prosedur saat memberikan kredit ke

Andi Winarto, selaku pemimpin PT Hatsuka Sarana Karya (HSK) dalam memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 548.000.000.000. Penyaluran kredit itu sendiri mengagungkan tanah induk dan bangunan ke bank lain. Setelah dikucurkan, ternyata pembayaran kredit tersebut macet sebesar Rp 548.000.000.000.

Penelitian sebelumnya mengenai corporate governance dan fungsi audit internal pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Bukair & Rahman (2015) yang meneliti tentang pengaruh performa bank dan dewan direksi terhadap kinerja bank syariah. Purnamasari, Hidayati & Amin (2020) meneliti tentang fungsi audit internal dan pengendalian internal dalam pelaksanaan good corporate governance. Ardi (2017) meneliti tentang peran audit internal terhadap pelaksanaan good governance di perbankan syariah. Indarti, et al. (2018) meneliti tentang efek kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan good corporate governance. Kholid & Bachtiar (2015) meneliti tentang good corporate governance dan kinerja maqasid syariah. Azizah & Erinos (2020) meneliti tentang Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. Lestari & Oktaviana (2020) meneliti tentang Peranan Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Zulphami, et al. (2018) meneliti tentang dana syirkah temporer dan corporate governance mechanism memengaruhi kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia.

Sulub, et al. (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh kekuatan dewan direksi dan corporate governance terhadap fungsi audit internal pada bank syariah di Sudan. Penelitian ini menganalisis pengaruh kekuatan dewan pengawas

syariah, kekuatan dewan direksi, pengungkapan tata kelola perusahaan, komite audit dan Investasi mudharabah (UIAH) terhadap fungsi audit internal pada bank syariah di Sudan. Mengacu pada penelitian tersebut, sehingga penelitian ini akan mereplikasi penelitian tersebut dengan melakukan perubahan pada variabel penelitian, sampel, skala pengukuran dan metode penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada latar belakang masalah penelitian, penggunaan variabel penelitian, metode pengukuran yang digunakan dalam melakukan penelitian, sampel yang digunakan dalam penelitian. Harapannya penelitian ini dapat menambah referensi dengan cara melakukan pembuktian ulang mengenai topik yang terkait dengan corporate governance yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan menggunakan konsep penelitian yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruhnya penerapan Corporate Governance yang diprosikan dengan Komite Audit, Dewan Direksi, Pengungkapan Islamic Corporate Governance dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Fungsi Audit Internal pada Bank Syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh pengungkapan islamic corporate governance secara parsial terhadap fungsi audit internal pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2015 – 2019 ?
2. Apakah ada pengaruh pengungkapan Dewan Pengawas Syariah secara parsial terhadap fungsi audit internal pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah di Indonesia tahun 2015 – 2019 ?

3. Apakah ada pengaruh pengungkapan komite audit secara parsial terhadap fungsi audit internal pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2015 – 2019 ?
4. Apakah ada pengaruh pengungkapan dewan direksi secara parsial terhadap fungsi audit internal pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2015 – 2019 ?
5. Apakah ada pengaruh pengungkapan islamic corporate governance, komite audit, dewan pengawas syariah dan dewan direksi secara simultan terhadap fungsi audit internal pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2015 – 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris:

1. Menjelaskan pengaruh pengungkapan islamic corporate governance secara parsial terhadap fungsi audit internal pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2015 – 2019 ?
2. Menjelaskan pengaruh pengungkapan Dewan Pengawas Syariah secara parsial terhadap fungsi audit internal pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2015 – 2019 ?
3. Menjelaskan pengaruh pengungkapan komite audit secara parsial terhadap fungsi audit internal pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2015 – 2019 ?
4. Menjelaskan pengaruh pengungkapan dewan direksi secara parsial terhadap fungsi audit internal pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di

Indonesia tahun 2015 – 2019 ?

5. Menjelaskan pengaruh pengungkapan islamic corporate governance, komite audit dewan pengawas syariah dan dewan direksi secara simultan terhadap fungsi audit internal pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tahun 2015 – 2019 ?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan perusahaan untuk meningkatkan fungsi audit internal dan menciptakan good corporate governance, khususnya pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

2. Manfaat untuk akademik

Memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan bidang tata kelola perusahaan, khususnya terkait dengan corporate governance dan fungsi audit internal merupakan harapan dari penelitian ini.

3. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai pengaruh corporate governance yang diukur dengan pengungkapan islamic corporate governance, dewan pengawas syariah, komite audit dan dewan direksi terhadap fungsi audit internal pada BUS & UUS. Penelitian ini menggunakan fungsi audit internal sebagai variabel dependen yang masih jarang digunakan oleh penelitian-penelitian terdahulu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan teori tentang corporate governance, Islamic corporate governance, dewan pengawas syariah, dewan direksi, komite audit fungsi audit internal, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai ruang lingkup penelitian yaitu populasi & sampel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, definisi operasional & pengukuran variabel penelitian, pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian berupa statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji auto korelasi, uji heteroskedastisitas, uji normalitas. Uji hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi, uji signifikansi simultan (Uji F), uji signifikansi parameter individual (uji t) serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN & SARAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan, implikasi penelitian dan saran penenelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori agensi merupakan teori dasar yang digunakan untuk mengembangkan konsep Corporate Governance. Teori ini dikembangkan oleh Michael Johnson, yang memandang bahwa pihak agen (manajemen) akan bekerja atas kepentingan sendiri, bukan sebagai pihak yang bekerja untuk kepentingan principal (pemegang saham).

Menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent* merupakan pengertian dari teori agensi. Kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut merupakan hubungan keagenan. (Jensen and Meckling, 1976)

Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu (Eisenhardt, 1989) :

1. Diri sendiri yang dipentingkan manusia pada umumnya (*self interest*)
2. Mengenai persepsi masa mendatang, manusia memiliki daya pikir terbatas (*bounded rationality*)
3. Risiko selalu dihindari manusia (*risk averse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, mengutamakan kepentingan pribadinya adalah tindakan *opportunistic* manajer sebagai manusia.

Pihak manajemen (agent) akan lebih mengetahui tentang keadaan perusahaan dan mengetahui semua informasi terkait perusahaan dari pada para pemegang saham (principal). Maka dari itu pihak manajemen berkewajiban untuk memberikan informasi terkait perusahaan kepada para pemegang saham. Namun informasi yang disampaikan terkadang bisa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pihak manajemen yang bekerja untuk kepentingannya sendiri dan tidak mengutamakan kepentingan pemegang saham, hal ini akan menimbulkan konflik kepentingan yang akhirnya akan timbulnya biaya agensi.

Biaya agensi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh para pemegang saham untuk menanggulangi konflik agensi, biaya dikeluarkan agar laporan yang diberikan pihak manajemen menjadi lebih transparan, biaya yang dikeluarkan untuk pihak independen yang melakukan pengendalian internal, dan biaya yang dikeluarkan dalam bentuk manfaat yang diberikan pada manajemen yang digunakan untuk menyelaraskan kepentingan agent (manajemen) dengan principal (pemegang saham).

2.1.2 Corporate Governance

Tata kelola perusahaan (corporate governance) merupakan dasar pedoman yang digunakan dalam menjalankan perusahaan. Menciptakan nilai tambah perusahaan untuk pihak yang berkepentingan (stakeholder) merupakan tujuan dari adanya Corporate Governance. Persaingan yang semakin tinggi dalam melakukan pengembangan perusahaan dengan cara mendapatkan tambahan modal yang akan diberikan investor, hal ini mengharuskan perusahaan untuk mengelola perusahaannya secara profesional, karena investor akan berinvestasi pada perusahaan yang menerapkan pengelolaan yang baik dengan tujuan investor akan

merasa aman dengan investasi yang ditanamkan di perusahaan tersebut.

Terdapat banyak definisi terkait Corporate Governance, para ahli mendefinisikan secara luas sesuai dengan kepentingan dan pemikirannya. OECD (2004) dan FCGI (2001) dalam Gideon (2005) mendefinisikan Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintahan, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. International Finance Corporation (2014) mendefinisikan corporate governance sebagai sebuah struktur dan proses dalam menentukan arah dan pengawasan terhadap perusahaan.

Dari beberapa definisi yang dipaparkan para ahli dapat disimpulkan bahwa Corporate Governance merupakan seperangkat peraturan yang digunakan untuk mengelola perusahaan yang dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan yaitu manajemen perusahaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa tata kelola dilaksanakan untuk kesejahteraan semua pihak termasuk pemilik perusahaan ataupun pemangku kepentingan.

Good Corporate Governance adalah praktek terbaik yang dilakukan oleh perusahaan yang mengacu pada seperangkat peraturan yang mengatur mengenai tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja manajemen, nilai perusahaan dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) manfaat pelaksanaan good corporate governance diharapkan :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan

keputusan yang lebih baik, lebih meningkatkan pelayanan kepada pemegang saham serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan nilai perusahaan.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan nilai pemegang saham dan dividen.

Pelaksanaan good corporate governance dilakukan dengan menggunakan prinsip yang berlaku secara internasional, Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001), menyatakan bahwa prinsip tersebut adalah :

1. Hak para pemegang saham, yang diberikan informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan serta dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan atas perusahaan.
2. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading).
3. Peranan pemegang saham diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
4. Pengungkapan secara akurat dan tepat pada waktunya serta terbuka mengenai

semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, serta para pemegang kepentingan.

5. Tanggungjawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Empat prinsip penerapan corporate governance yaitu (Nasrum & Uleung, 2014) :

1. Kewajaran (Fairness)

Menjamin hak-hak para pemegang saham mayoritas, minoritas dan para pemegang saham asing serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

2. Transparansi (Transparency)

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas serta dapat dibandingkan dengan banyak hal.

3. Akuntabilitas (Accountability)

Menjelaskan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin keseimbangan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan.

4. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Memastikan peraturan dan ketentuan yang berlaku sudah dipatuhi sebagai cerminan diterapkannya nilai sosial.

2.1.3 Islamic Corporate Governance

Prinsip dasar pelaksanaan ICG di perbankan syariah ini juga dijelaskan pada Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) yang dikeluarkan oleh KNKG tahun 2011. Prinsip tersebut adalah (KNKG, 2011) :

1. Keterbukaan

Surat Al Baqarah/2 : 282 menegaskan berdasarkan prinsip syariah “... dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi ...”, dan berdasarkan hadits yang menyebutkan “... barang siapa yang melakukan ghisya (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”, maka semua transaksi harus dilakukan secara terbuka.

Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat maka diperlukan transparansi.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah sebagaimana terdapat dalam surat al-Isra/17: 84 yang artinya “Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya dan Tuhan kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya di antara kalian”, serta dalam ayat 36 yang artinya “...dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban”. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka dari itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Kinerja yang berkesinambungan merupakan syarat dari akuntabilitas.

merupakan prasyarat.

3. Responsibilitas

Hubungan dengan asas responsibilitas, pelaku bisnis syariah selain perlu melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan juga perlu mematuhi peraturan perundangan serta ketentuan bisnis syariah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Isra/17: 14 tanggung jawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat, yang semuanya direkam dalam catatan yang akan dicermatinya nanti, artinya: “Bacalah kitabmu (laporan pertanggungjawabanmu). Cukuplah kamu pada waktu itu mengevaluasi dirimu sendiri.”

4. Independensi

Dalam hubungan dengan asas independensi, bisnis syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, (Fushshilat/41: 30). Independen merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam al-Qur“an disebutkan sebanyak 16 kali, yang di antara karakternya adalah “Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun).”

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran serta kesetaraan terdapat unsur kesamaan perlakuan serta kesempatan. Allah Swt berfirman dalam surat al-Maidah/5: 8, artinya: “Wahai

orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap orang (golongan) lain menyebabkan kamu tidak berlaku adil. berlaku adil lah kamu karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” *Fairness* atau kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasar suka atau tidak suka.

2.1.4 Dewan Pengawas Syariah

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, dalam pengoperasiannya lembaga keuangan syariah harus berdasar pada prinsip syariah, untuk menjamin lembaga keuangan syariah tidak melakukan penyimpangan dan berjalan sesuai dengan tuntunan syariah maka di setiap lembaga keuangan syariah dibentuk lembaga pengawas yang berfungsi untuk mengawasi operasional lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) ditunjuk sebagai dewan yang mengawasi Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan fatwa –fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Firdaus et all (2007) dalam bukunya mendefinisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan

Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, setiap bank Islam atau lembaga keuangan Islam di Indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang secara umum bertugas untuk memberikan nasihat serta saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar tidak melenceng dari prinsip syariah.

Secara struktur organisasi, kedudukan DPS berada dalam koordinasi dua struktur organisasi, yaitu :

1. Dalam struktur organisasi perusahaan, kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sejajar dengan Dewan Komisaris yang memiliki alur koordinasi dengan Direksi.
2. Dalam struktur organisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) berada di bawah DSN yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada Perusahaan Syariah. Sehingga DPS juga wajib untuk bertanggungjawab kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam melaksanakan tugasnya.

Syarat keanggotaan Dewan Pengawas Syariah yaitu :

1. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
3. Masa tugas anggota dewan pengawas syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah

merusak citra DSN.

2.1.5 Dewan Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Rustam, 2013).

Dewan direksi berkewajiban menentukan kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan, baik untuk rencana jangka panjang maupun jangka pendek. Selain harus membuat keputusan dan strategi yang akan dijalankan oleh perusahaan, dewan direksi juga perlu melakukan pengontrolan apakah kebijakan yang dibuat sudah dijalankan dengan baik.

Jika melihat tugas dan fungsi dewan direksi tidaklah mudah, jika terdapat kelalaian ataupun kesalahan dalam pengambilan keputusan akan menyebabkan dampak yang besar ataupun perusahaan akan mengalami kerugian. Maka dari itu dalam mengangkat dewan direksi harus mempertimbangkan kemampuan seseorang dalam memimpin ataupun dalam pembuatan keputusan. Dalam menjalankan kewajibannya dewan direksi juga harus penuh kehati-hatian dan memberikan keputusan terbaiknya, jangan hanya bekerja untuk kepentingan diri sendiri ataupun hanya untuk mengejar profit saja tanpa memahami apakah tindakannya diperbolehkan atau tidak menurut peraturan perusahaan.

2.1.6 Komite Audit

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 yang dimaksud dengan Komite Audit adalah pihak independen yang mengevaluasi pelaksanaan

audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan.

Komite Audit menjadi jembatan yang menghubungkan antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan pihak manajemen, maka dari itu Komite Audit harus bebas dari pengaruh pihak manapun terutama pihak manajemen sehingga dapat menjalankan kewajibannya untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian manajemen dan peran auditor internal ataupun auditor eksternal. Komposisi yang baik untuk susunan Komite Audit yaitu terdapat 1 (satu) orang Dewan Komisaris Independen sebagai ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang merupakan pihak eksternal yang independen menjadi anggota Komite Audit.

Prinsip good corporate governance komite audit harus menjalankan prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Independensi

Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Selain itu, anggota komite audit seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis apa pun dengan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan komisaris perusahaan, sehingga terhindar dari benturan kepentingan. Oleh karena itu, nama-nama anggota komite audit (terutama di perusahaan publik) hendaknya diumumkan ke masyarakat atau publik sebagai wujud akuntabilitas terhadap sikap independensi mereka. Hal ini penting agar masyarakat dapat melakukan kontrol sosial serta penilaian terhadap para anggota komite audit tersebut.

2. Prinsip Transparansi

Prinsip ini ditunjukkan melalui piagam komite audit (audit committee charter),

program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodik yang didokumentasikan dalam notulen rapat. Komite audit hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kerjanya sebagai wujud pengungkapan (disclosure). Diharapkan agar laporan tersebut dituangkan dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan yang dipublikasikan kepada publik.

3. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit seharusnya memiliki kapabilitas, kompetensi, dan pengalaman di bidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara profesional.

4. Prinsip Pertanggung Jawaban

Prinsip ini ditunjukkan oleh aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, kinerja komite audit hendaknya dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada publik, selain kepada dewan komisaris.

5. Prinsip Kewajaran

Prinsip ini ditunjukkan oleh sikap komite audit dalam pengambilan keputusan yang didasarkan atas sikap adil (fair) dan objektif terhadap semua pihak.

2.1.7 Fungsi Audit Internal

Menurut Tugiman (2006) audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Audit internal merupakan kegiatan dalam suatu organisasi yang dilakukan untuk memberikan nilai tambah dalam rangka

meningkatkan kualitas aktivitas operasional suatu organisasi. Audit internal juga dilakukan untuk mengontrol manajemen agar berjalan sesuai dengan peraturan dan berdasarkan bekerja untuk kepentingan semua pihak.

Audit Internal dilakukan oleh seseorang yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan yang disebut auditor internal. Keberadaan profesi auditor internal di dalam suatu organisasi membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan ketat agar dapat melakukan evaluasi dan peningkatan efektivitas terhadap manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola (Randal J. Elder dkk, 2011).

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001) mengatakan fungsi audit internal adalah memantau kinerja pengendalian entitas. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian internal, auditor harus berusaha memahami fungsi audit intern yang cukup untuk mengidentifikasi aktivitas audit internal yang relevan dengan pernyataan audit. Sedangkan Menurut Mulyadi (2010) fungsi audit internal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi sebagai tugas organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah mengukur dan menilai efektivitas dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain.
2. Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen,

auditor internal menyediakan jasa-jasa tersebut. Auditor internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada unit atas catatan akuntansi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi audit internal yaitu suatu kegiatan pengendalian menyeluruh yang dilakukan dalam perusahaan untuk memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Fungsi audit internal yaitu melakukan pencarian terhadap kesalahan yang terjadi di berbagai unsur operasional tidak hanya sebatas pencarian rutin atas ketepatan dalam catatan akuntansi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Corporate Governance sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak baik oleh para peneliti. Namun untuk fungsi audit internal sebagai variabel dependen masih belum banyak penelitian terkait ini. Beberapa topik yang cukup banyak diteliti yaitu penelitian yang menguji pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan dan kinerja keuangan. Penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

No	Judul	Nama Peneliti	Tahun Jurnal	Nama Jurnal	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dewan Direksi dan risiko Kredit. Study kasus pada Bank Syariah di Indonesia	Peni Nugraheni, Rifqi Muhammad	2019	Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol.23 No.4	Bank umum syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunan tahun 2013-2017	Variabel dependen : risiko kredit. Variabel independen : jumlah rapat, dan keahlian, ukuran dewan direksi, kualifikasi pendidikan	Jumlah rapat direksi memiliki pengaruh negatif pada risiko kredit, ukuran dewan direksi berpengaruh positif pada risiko kredit, kualifikasi pendidikan dan keahlian tidak memengaruhi risiko kredit bank syariah di Indonesia.

2	Dewan direksi dan perilaku pengambilan risiko Bank Islam di Asia Tenggara	Faaza Fakhrunnas, Zulkufly Ramly	2017	Tazkia Islamic Finance and Business Review Vol.10 No.2	24 perbankan syariah di Asia Tenggara yang diobservasi selama enam periode yakni pada tahun 2009-2014	Variabel dependen : pengambilan risiko bank (Z-Score dan risiko kredit) Variabel independen : ukuran dewan direksi, independensi dewan dan DPS	Penelitian ini menemukan bahwa independensi dewan memengaruhi perilaku risiko secara positif sementara itu DPS mempunyai hubungan yang negatif. Kemudian, ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap risiko kredit tetapi berpengaruh negatif terhadap z-score.
3	Keragaman Gender dalam	Hikmah Endraswati	2018	Review of Integrative	11 bank syariah di	Variabel dependen : kinerja perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

<p>direksi dan kinerja perusahaan : Studi kasus pada Bank Syariah di Indonesia</p>			<p>Business and Economics Research Vol.7 No.1</p>	<p>Indonesia periode 2011-2015</p>	<p>Variabel independen : proporsi perempuan sebagai direktur, masa jabatan perempuan sebagai direktur, tingkat pendidikan perempuan sebagai direktur, latar belakang pendidikan perempuan sebagai direktur, ukuran perusahaan</p>	<p>proporsi perempuan sebagai direktur berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Masa jabatan perempuan, latar belakang pendidikan perempuan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah. Hanya tingkat pendidikan perempuan sebagai</p>
--	--	--	---	------------------------------------	---	--

							direktur yang tidak memengaruhi kinerja bank syariah di Indonesia.
4	Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perbankan Pada Bank Pembangunan Daerah	Cheryl Virgin Warouw, Parengkuan Tommy, Fitty Valdy Arie	2018	Jurnal EMBA (Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi) Vol.6 No.1	Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah Indonesia sebanyak 26 perusahaan. Sampel yang digunakan hanya 6	Variabel dependen : kinerja perbankan Variabel independen : kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi	Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perbankan pada Bank Pembangunan Daerah, Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perbankan pada Bank Pembangunan Daerah, Dewan Direksi

	Indonesia Tahun 2011-2015				perusahaan		berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perbankan pada Bank Pembangunan Daerah
5	Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Di Bprs Harum Hikmahnugraha	Biki Zulfikri Rahmat	2017	Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No.2	BPRS Harum Hikmahnugrah a, jumlah responden 50	Variabel dependen : pelaksanaan GCG Variabel independen : Dewan Pengawas Syariah	Hasil penelitian menunjukkan GCG bank syariah berbeda dengan yang dilaksanakan bank konvensional dan memiliki karakteristik terkait dengan operasional. Perbedaan terletak pada shari'ah compliance pada aktivitas

							bank syariah. Sehingga dapat disimpulkan DPS sangat berperan dalam pelaksanaan GCG di BPRS Harum Hikmah Nugraha
6	Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Direksi Terhadap	Gista Rismayani & Ulfa Luthfia Nanda	2018	E-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 4 No.2	7 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia	Variabel dependen : kinerja maqasid syariah Variabel independen : kinerja dewan komisaris, DPS dan direksi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kinerja dewan komisaris, DPS dan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah.

	Kinerja Maqasid Syariah						
7	Pengaruh profesionalisme dewan pengawas syariah terhadap Kinerja Perbankan Syariah	Husnul Khotimah	2019	Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol. 2 No.2	11 bank syariah di Indonesia dan 12 bank syariah di Malaysia dengan tahun penelitian 5 tahun yaitu tahun 2007-2011	Variabel dependen : kinerja bank Syariah (ROA, ROE, AG) Variabel independen : profesionalisme dewan pengawas syariah	DPS berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja bank syariah baik dari sisi ROA, ROE maupun AG
8	Pengaruh Sistem	Sukma	2019	Jurnal Riset	13 perusahaan	Variabel dependen :	Hasil penelitian ini

<p>Pengendalian Akuntansi dan Pengendalian Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Syariah Kantor Wilayah Sumatera Utara)</p>	<p>Lesmana</p>		<p>Akuntansi dan Bisnis Vol.19 No.1</p>	<p>bank syariah kantor wilayah sumatera utara dengan responden kepala kantor wilayah dan manajer bagian keuangan sehingga jumlah responden sebanyak 26 orang</p>	<p>kinerja bank syariah Variabel independen : sistem pengendalian akuntansi dan pengendalian Dewan Pengawas Syariah</p>	<p>menjelaskan bahwa sistem pengendalian akuntansi dan DPS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa untuk mencapai kinerja bank syariah berdasarkan maqasid syariah, manajemen harus memaksimalkan</p>
---	----------------	--	---	--	---	---

							<p>penggunaan sistem kontrol akuntansi dan kontrol dewan pengawas syariah dalam mencapai kinerja bank syariah berdasarkan maqasid syariah.</p>
9	Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting	Hasan Mukhibad	2018	Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol.9 No.2	8 Bank Umum Syariah di Indonesia untuk periode 2011-2016	<p>Variabel dependen : islamic social reporting</p> <p>Variabel independen : profil Dewan Pengawas Syariah, ukuran perusahaan, ukuran Dewan</p>	<p>Profil DPS berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan ISR.</p> <p>Ukuran bank, ukuran dewan komisaris, dan tingkat leverage. umur perusahaan tidak memiliki efek positif terhadap</p>

						<p>Komisaris, leverage, dan umur perusahaan</p> <p>Variabel dependen : profitabilitas tahun depan</p> <p>Variabel independen : Islamic Social Reporting</p>	<p>pengungkapan ISR.</p> <p>Pengungkapan ISR memengaruhi kinerja profitabilitas pada tahun depan, baik profitabilitas dengan indikator ROA maupun ROE.</p>
10	<p>Performa bank dan dewan direksi Bank Syariah</p>	<p>Abdullah Awadh Bukair, Azhar Abdul</p>	2015	<p>International Journal of Islamic and Middle</p>	<p>40 Islamic banks operating in Gulf</p>	<p>Variabel dependen : kinerja bank (ROE & ROA)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan komposisi dewan komisaris</p>

		Rahman	Eastern Finance and Management Vol.8 No.3	Cooperation Council (GCC) periode 2008 sampai 2011	Variabel independen : ukuran dewan, komposisi dewan komisaris, pemisahan CEO dan peran ketua, independensi ketua, IAH, ukuran kontribusi social. Variabel kontrol : leverage, produk domestik bruto	berpengaruh negatif terhadap kinerja bank. Pemisahan peran CEO & ketua dan IAH tidak berpengaruh. Independensi ketua berdampak positif. Ukuran kontribusi sosial (zakat) dan produk domestik bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank. Ukuran bank berpengaruh positif terhadap kinerja bank
--	--	--------	--	---	--	---

							sedangkan leverage berpengaruh negatif.
11	Tata kelola perusahaan, Kekuatan DPS dan penggunaan fungsi Audit Internal pada Bank Syariah di Sudan	Saed Ahmed Sulub, Zalailah Salleh and Hafiza Aishah Hashim	2018	Journal of Islamic Accounting and Business Research Vol. 11 No.1	14 Bank di Sudan periode tahun 2008-2013	Variabel dependen : fungsi audit internal Variabel independen : kekuatan DPS, pengungkapan tata kelola perusahaan, kekuatan dewan, komite audit, UIAH Variabel kontrol : ukuran bank	Kekuatan Dewan Direksi dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap fungsi audit internal Pengungkapan Corporate Governance dan Kekuatan DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap fungsi audit internal
12	Fungsi Audit	Laela	2020	(E-JRA) E-	55 karyawan	Variabel dependen :	Fungsi Auditor

	Internal Dan Pengendalian Internal Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance	Purnamasari, Nur Hidayati, Moh. Amin		Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang Vol.9 No.6	Perusahaan SPBU di Kota Malang	good corporate governance Variabel independen : fungsi auditor internal, pengendalian internal	berpengaruh positif terhadap Good Corporate Governance, Variabel Pengendalian Internal berpengaruh Positif Pelaksanaan Good corporate Governance
13	Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good	Muhammad Ardi	2017	Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum Vol.15 No.2	Bank Syariah di Indonesia	Variabel dependen : good corporate governance Variabel Independen	Audit internal dan pengendalian internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap pelaksanaan good

	Governance Di Perbankan Syariah					: audit internal dan pengendalian internal	governance di Perbankan Syariah.
14	Peran Fungsi Audit Internal Dalam Mempromosikan Tata Kelola Perusahaan yang Efektif pada Bank Konvensional di Kenya	Michael Kipkurui Changwony, & Dr. Gladys Rotich	2015	International Journal of Business & Law Research Vol.3 No.1	Bank Konvensional di Kenya (89 responden)	Variabel dependen : tata kelola Perusahaan yang Efektif Variabel independen : penempatan audit internal, independensi audit internal, identifikasi risiko, kepegawaian	Studi ini menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara posisi audit internal, identifikasi risiko, kepegawaian audit internal terhadap tata kelola perusahaan yang efektif. Studi ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang

					audit internal	signifikan antara independensi audit internal terhadap tata kelola perusahaan yang efektif pada bank umum.	
15	Pengaruh Kualitas Audit, Kinerja Keuangan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Good Corporate	Dwi Yanti	2015	Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini Vol.6 No.1	Populasi penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-	Variabel dependen : pengungkapan good corporate governance Variabel independen : kualitas audit, kinerja keuangan (Return on Equity),	Variabel kualitas audit (KA) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan good corporate governance. Variabel kinerja keuangan (ROE) juga tidak berpengaruh terhadap pengungkapan good corporate

	Governance Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia				2013 (21 sampel perusahaan)	Ukuran Perusahaan	governance.
16	Pengaruh Kualitas Audit Dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Good Corporate Governance	Indarti, Ika Berty Apriliani and Aznuriyandi	2018	Earth and Environment al Science Vol.175	Populasi penelitian perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2016. Sampel 16 perusahaan	Variabel dependen : pengungkapan tata kelola perusahaan Variabel independen : ukuran perusahaan & kualitas auditor	Variabel Kualitas Audit memiliki koefisien regresi positif, Ukuran Perusahaan memiliki koefisien negatif

	Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia						
17	Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia	Muamar Nur Kholid, Arief Bachtiar	2015	Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia Vol.19 No.2	7 bank syariah di Indonesia dari tahun 2010-2014	Variabel dependen : kinerja maqasid Variabel independen : jumlah dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan komite audit	Jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah. Jumlah komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah. Jumlah dewan

							pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia
18	Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan	Jumainii Azizah, Erinosi NR	2020	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol.2 No.1	Perbankan Syariah di Indonesia periode Tahun 2014-2018 (12 Bank)	Variabel dependen : kinerja pada perbankan syariah Variabel independen : Dewan Komisaris, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah	Dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Perbankan Syariah. Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Perbankan Syariah. DPS mempunyai pengaruh negatif signifikan

	Syariah						terhadap Kinerja Bank Syariah
19	Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan	Liya Ermawati, Yulistia Devi, Naurah Nazhifah Arramadani	2020	Jurnal Akuntansi Keuangan Vol.11 No.1	30 perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) periode 2016-2017	Variabel dependen : kualitas laporan keuangan Variabel independen : kualitas audit, komite audit –[Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
20	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kinerja Sosial,	Eka Hartawati, Ni Luh Gd Erni Sulindawati, Putu Sukma	2017	e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha	Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) Periode	Variabel dependen : Islamic Social Reporting Variabel independen	Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR. Profitabilitas tidak berpengaruh positif dan

<p>Kinerja Lingkungan Dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Isr) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii) Periode Tahun 2014-2016</p>	<p>Kurniawan</p>		<p>Vol.8 No.2</p>	<p>Tahun 2014-2016 (51 sampel)</p>	<p>: ukuran perusahaan, profitabilitas, kinerja sosial, kinerja lingkungan, komite audit</p>	<p>signifikan terhadap ISR. Kinerja sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR. Kinerja lingkungan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR. Komite audit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR.</p>
---	------------------	--	-------------------	------------------------------------	--	---

21	Peranan Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Iin Fitri Lestari, Ulfi Kartika Oktaviana	2020	Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol.8 No.1	Objek penelitian ini sebanyak 15 BPRS di Jawa Timur yang terdaftar dalam OJK dan BI. Total kuesioner sebanyak 38.	Variabel dependen : kualitas laporan keuangan Variabel independen : komite audit, Dewan Pengawas Syariah	Terdapat pengaruh positif antara peranan komite audit terhadap kualitas laporan keuangan. Peranan DPS berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.
22	Dana Syirkah Temporer Dan Corporate Governance	Zulpahmi, Sumardi, Andika	2018	Jurnal Ilmu Akuntansi Vol.11 No.1	6 perbankan syariah di Indonesia	Variabel dependen : kinerja maqasid syariah	Dana syirkah temporer tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja maqasid

	<p>Mechanism memengaruhi Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia</p>					<p>Variabel independen : dana syirkah temporer, ukuran dewan komisaris, rapat dewan komisaris, ukuran dewan direksi, rapat dewan direksi, ukuran dewan pengawas syariah, rapat dewan pengawas syariah</p>	<p>syariah. Ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja maqasid syariah. Rapat dewan komisaris secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja maqasid syariah. Ukuran dewan direksi secara parsial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja maqasid syariah.</p>
--	--	--	--	--	--	---	---

						<p>Rapat dewan direksi secara parsial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja maqasid syariah. Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja maqasid syariah.</p> <p>Rapat dewan pengawas syariah secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan</p>
--	--	--	--	--	--	---

				ISLAM		terhadap kinerja maqasid syariah
--	--	--	--	-------	--	----------------------------------

Tabel 2.1
 Penelitian Terdahulu

الجامعة الإسلامية
 البانداونج

2..3 Kerangka Pemikiran

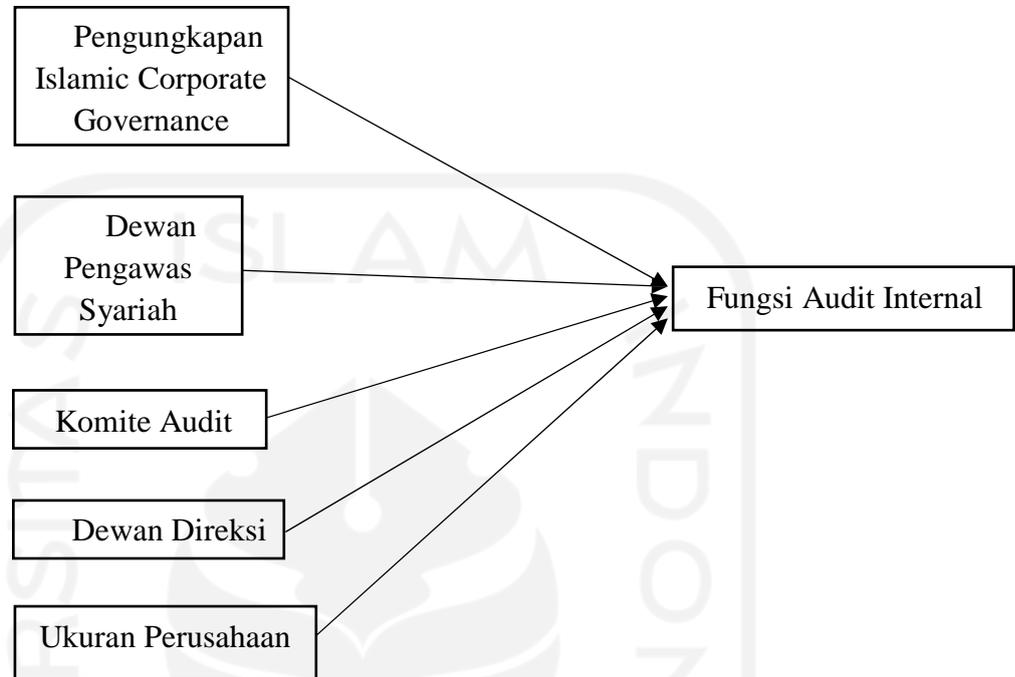
Teori agensi menyatakan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (principal) dan pihak manajemen (agent). Perbedaan kepentingan ini menyebabkan adanya agensi problem di mana permasalahan ini akan berdampak pada tata kelola perusahaan. Untuk mencegah terjadinya agensi problem maka audit internal difungsikan untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan agar berjalan sesuai peraturan dan akan terciptanya Good Corporate Governance.

Kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisis suatu tata kelola perusahaan yaitu yang diwakili dengan komite audit, dewan direksi, dewan pengawas syariah dan pengungkapan Islamic Corporate Governance, dengan menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan, yang mempunyai pengaruh terhadap bagaimana fungsi audit internal bekerja untuk perusahaan serta dapat menciptakan Good Corporate Governance dan mencegah terjadinya agensi problem yang kemungkinan akan terjadi di perusahaan.

Dalam penelitian ini menggunakan sampel Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah karena sektor perbankan syariah mempunyai karakteristik yang lebih kompleks dan berbeda dari perusahaan sektor lain. Perbankan islam tidak hanya diharuskan mematuhi peraturan tata kelola yang umum terjadi di perbankan konvensional, namun perbankan islam harus mengacu pada syariat islam yang sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari itu pengawasan pada perbankan syariah menjadi lebih rumit. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Corporate Governance merupakan aturan yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang berfungsi untuk memastikan aktivitas perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk memenuhi kepentingan pemangku kepentingan. Audit Internal merupakan bagian dari perusahaan yang berperan dalam menegakkan corporate governance. Pengungkapan corporate governance yang baik mengindikasikan bahwa Audit Internal melakukan perannya dengan baik dalam melakukan pengawasan atas aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan.

Sulub, et al. (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa Pengungkapan Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap fungsi audit internal, yang artinya perusahaan yang mempunyai tingkat

pengungkapan Corporate Governance yang baik akan memengaruhi dan mempermudah fungsi audit internal.

Yanti (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kualitas audit tidak mempunyai pengaruh dengan pengungkapan good corporate governance. Indarti, et al. (2018) mengungkapkan bahwa Kualitas Audit memiliki koefisien regresi negatif. Ini berarti bahwa perusahaan dengan tingkat Kualitas Audit yang tinggi tidak memengaruhi pengungkapan Corporate Governance. Berdasarkan uraian di atas dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini akan menguji hipotesis :

H1 : Pengungkapan Islamic Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Fungsi Audit Internal

Dewan pengawas syariah merupakan dewan yang bertugas untuk mengontrol lembaga keuangan syariah supaya dalam menjalankan perusahaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya penilaian dari DPS perusahaan akan berusaha melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen dan jajarannya. Di sini peran Audit Internal diperlukan untuk membantu pengawasan kinerja manajemen supaya sesuai dengan prinsip syariah.

Lesmana (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pengendalian DPS dengan Kinerja Perbankan Syariah. Mukhibad (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap luasan Pengungkapan ISR. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa profil DPS yang tinggi akan memiliki efek pada semakin luasnya ISR bank.

Rismayani & Nanda (2018) dalam penelitiannya membuktikan bahwa

kinerja DPS yang diukur dengan jumlah rapat DPS tidak Mempunyai pengaruh dengan kinerja *maqasid* syariah. Hasil penelitian menunjukkan arah koefisien negatif yang artinya semakin tinggi intensitas jumlah rapat DPS maka akan semakin rendah kinerja *maqasid* syariah. Khotimah (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan SSB tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah, hal ini kemungkinan disebabkan tugas dan fungsi SSB belum dapat dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan uraian di atas dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, jadi penelitian ini akan menguji hipotesis sebagai berikut :

H2 : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Fungsi Audit Internal

Komite Audit merupakan badan pengawas dan bertanggung jawab untuk menjaga akses komunikasi antara para pemangku kepentingan. Peran Komite audit diantaranya adalah memberikan penilaian terhadap kinerja Audit Internal sehingga pelaksanaan pengelolaan perusahaan dan pelaporan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Audit internal yang berfungsi dengan baik akan mempermudah komite audit dalam melakukan pengawasan dan hal ini memengaruhi Good Corporate Governance.

Hikmah (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa secara parsial peran komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan syariah, artinya semakin optimal Komite Audit dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya maka kepatuhan syariah di BPRS juga akan terjaga dengan baik. Lestari & Octaviana (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa peranan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti jika Komite Audit menjalankan perannya semakin aktif dan semakin

baik, maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPRS semakin baik dan berkualitas, sesuai dengan SAK yang berlaku.

Bachtiar & Kholid (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan pada jumlah komite audit terhadap kinerja maqasid syariah pada bank syariah, yang artinya semakin sedikit jumlah anggota komite audit justru akan dapat meningkatkan kinerja maqasid syariah bank syariah dari pada jumlah komite audit yang besar. Ermawati, et al. (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tidak berpengaruh signifikan pada komite audit terhadap kualitas laporan keuangan. Azizah & Erinoss (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah, artinya jumlah komite audit yang besar tidak menjamin keefektifan pengawasan pada bank umum syariah. Berdasarkan uraian di atas dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini akan menguji hipotesis sebagai berikut :

H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Fungsi Audit Internal

Dewan direksi merupakan pimpinan yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan dan memastikan bahwa kinerja manajemen perusahaan bekerja untuk kepentingan pemegang saham. Untuk melakukan pengawasan ini, dewan direksi akan menggunakan audit internal. Fungsi audit internal adalah meningkatkan kepercayaan para pemegang saham atas kinerja manajemen.

Warouw, et al. (2018) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada Dewan Direksi terhadap Kinerja Perbankan pada Bank Pembangunan Daerah, artinya bahwa dewan direksi akan memengaruhi kinerja

Bank Pembangunan Daerah. Rismayani, et al. (2018) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan antara jumlah dewan direksi terhadap kinerja maqasid syariah perbankan. Berdasarkan uraian di atas dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini akan menguji hipotesis sebagai berikut :

H4 : Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Fungsi Audit Internal



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi & Sampel

Menurut Sugiyono (2011) populasi dapat didefinisikan dengan wilayah yang digeneralisasikan, terdiri dari objek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2019, yaitu sebanyak 14 Bank Umum Syariah dan 19 Unit Usaha Syariah di Indonesia selama tahun 2015 sampai dengan 2019.

Peneliti memilih populasi sektor perbankan Islam karena mempunyai karakteristik yang lebih kompleks dari pada perusahaan sektor lain. Perbankan Islam harus mengacu pada syariat Islam yang sesuai dengan prinsip syariah. Dasar pedoman prinsip syariah yaitu ayat yang terkandung dalam Al Quran. Transaksi ataupun investasi yang dilakukan dalam bank syariah juga harus menerapkan prinsip syariah yang melarang adanya riba. Maka dari itu pengawasan pada perbankan syariah menjadi lebih rumit yaitu mengawasi tata kelola perusahaan dan memastikan seluruh kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu sampel. Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Artinya sampel merupakan bagian dari populasi. Penentuan sampel yang akan diambil dari populasi harus didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan tertentu. Teknik purposive sampling merupakan teknik yang

digunakan penulis dalam pengambilan sampel. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya teknik ini digunakan untuk mempermudah penelitian, dengan menetapkan karakteristik-karakteristik tertentu dalam pemilihan sampel. Kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu :

1. Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar selama periode 2015-2019 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Secara berturut-turut selama periode 2015-2019 perusahaan mempublikasikan laporan tahunan.
3. Perusahaan yang memiliki data yang dibutuhkan terkait pengukuran variabel yang digunakan untuk penelitian selama periode 2015-2019.
4. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 bank umum syariah dan 19 unit usaha syariah di Indonesia periode 2015-2019. Daftar sampel akan dijelaskan pada tabel 3.1

Table 3.1
Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan
	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. Bank BCA Syariah
3	PT. Bank BNI Syariah
4	PT. Bank BRI Syariah

5	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia
7	PT. Bank Mega Syariah
8	PT. Bank Muamalat Indonesia
9	PT. Bank NTB Syariah
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11	PT. Bank Syariah Bukopin
12	PT. Bank Syariah Mandiri
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14	PT. Bank Victoria Syariah
	Unit Usaha Syariah
15	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
16	PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
17	PT. Bank OCBC NISP, Tbk
18	PT. Bank Permata, Tbk
19	PT. Bank Riau Kepri
20	PT. Bank Sinarmas
21	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
22	PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
23	PT. BPD DKI
24	PT. BPD Jambi
25	PT. BPD Jawa Tengah
26	PT. BPD Jawa Timur, Tbk

27	PT. BPD Kalimantan Barat
28	PT. BPD Kalimantan Selatan
29	PT. BPD Kalimantan Timur
30	PT. BPD Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, Tbk
31	PT. BPD Sumatera Barat
32	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
33	PT. BPD Sumatera Utara

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK per Mei 2020

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2016) mendefinisikan studi dokumentasi merupakan dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan kebijakan.

Data sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa laporan keuangan tahunan (annual report) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2015 sampai dengan 2019 yang telah dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan. Laporan yang dimaksud yaitu mencakup laporan manajemen, laporan pelaksanaan corporate governance khususnya yang terkait dengan pengungkapan islamic corporate governance, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Dewan Direksi dan fungsi audit internal. Sumber penelitian ini juga diperoleh dengan cara pengumpulan data dan informasi dengan mengolah literatur, buku, artikel, jurnal, dan media informasi lainnya yang berhubungan dengan topik

penelitian ini.

3.3 Definisi Operasional Variabel serta Pengukuran Variabel Penelitian

Penelitian menggunakan variabel dependen adalah fungsi audit internal. Sementara untuk variabel independennya yaitu islamic corporate governance, dewan pengawas syariah, komite audit, dewan direksi. Menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan.

3.3.1 Fungsi Audit Internal

Menurut Mulyadi (2002) fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.

Fungsi Audit Internal, diukur dengan menggunakan :

1. Perusahaan yang mengungkapkan keberadaan internal audit dalam laporan tahunannya diberikan nilai satu (1), sebaliknya jika tidak mengungkapkan akan diberi nilai nol (0) (Restuningdiah, 2010)
2. DeFond, et al. (2005) dalam Femiarti & Dewayanto (2012) dalam penelitiannya internal audit diukur dari bernilai 1 jika posisi Chief Audit Executive (CAE) adalah officer dan 0 jika tidak.

3.3.2 Pengungkapan Islamic Corporate Governance

Menurut Bhattii dan Bhatti (2010) Islamic Corporate Governance merupakan tata kelola yang dapat diarahkan oleh nilai moral dan berdasar pada hukum syariah berusaha untuk merancang cara di mana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan. Dalam penelitiannya Meilani (2015) mengadaptasi dari penelitian sebelumnya (Jumansyah dan Syafei, 2013) skor

indeks yang digunakan dalam penerapan GGBS. Ada 41 indikator berdasarkan pedoman Penerapan GGBS yang dibuat oleh KNKG (2011), indeks penerapan GGBS oleh bank umum syariah di Indonesia.

Diberikan skor satu jika perusahaan mengungkapkan indikator yang dimaksud dalam laporan keuangan, untuk pengukuran indeks penerapan GGBS tersebut. Diberikan skor nol jika tidak mengungkapkan indikator yang dimaksud dalam laporan keuangan. Jika semua indikator diungkapkan dalam laporan keuangan maka peneliti akan memberikan skor 41. Dalam menentukan seberapa besar tingkat pengungkapan ICG digunakan rumus sebagai berikut :

ICG = Jumlah item yang diungkapkan

Jumlah skor maksimal

Tabel 3.2

Indikator Pengungkapan Islamic Corporate Corporate Governance

No	Indikator
1	Anggota dewan komisaris
2	Status dewan komisaris
3	Fungsi dan mekanisme kerja dewan komisaris
4	Jumlah rapat dewan komisaris
5	Jumlah kehadiran setiap dewan komisaris
6	Mekanisme dan Kriteria Self Assessment tentang kinerja dewan komisaris Nama dan susunan komite penunjang
7	Fungsi dan mekanisme kerja komite
8	Jumlah rapat komite
9	Jumlah kehadiran komite

10	Mekanisme dan kriteria penilaian kerja komite
11	Laporan pelaksanaan tugas komite
12	Laporan pelaksanaan tugas komite
13	Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah
14	Jumlah kehadiran Dewan Pengawas Syariah
15	Mekanisme dan Kriteria Self Assessment Dewan Pengawas Syariah
16	Nama anggota direksi
17	Jabatan anggota direksi
18	Fungsi direksi
19	Pengambilan keputusan direksi
20	Pendelegasian wewenang direksi
21	Jumlah rapat anggota direksi
22	Jumlah kehadiran anggota direksi
23	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja anggota direksi
24	Efektivitas fungsi kepatuhan
25	Efektivitas audit internal
26	Efektivitas audit eksternal
27	Batas maksimum penyaluran kredit
28	Laporan kinerja keuangan
29	Transparansi produk
30	Laporan perubahan manajemen risiko, SPI, dan Sistem teknologi
31	Pembayaran zakat
32	Corporate Social Responsibility (CSR)

33	Fungsi penyalur dan penerima dana sosial
34	Visi
35	Misi
36	Nilai
37	Pemegang saham pengendali perusahaan
38	Investor berbasis profit and loss
39	Kebijakan dan jumlah remunerasi dewan komisaris, direksi, DPS
40	Transaksi pihak ketiga yang memiliki benturan kepentingan
41	Hasil penerapan GGBS

Sumber : Komite Nasional Kebijakan Governance (*KNKG*)

3.3.3 Dewan Pengawas Syariah

Menurut Firdaus (2007) Dewan pengawas syariah yaitu suatu badan di lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN. Setelah melalui RUPS DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Mukhibad (2018) dalam penelitiannya memaparkan indikator pengukuran variabel dewan pengawas syariah yang dikembangkan dari penelitian Grassa, Chakroun, & Hussainey (2018), Farook, Hassan, & Lanis (2011), Mallin, Farag, & Ow-Yong (2014), Indrawaty & Wardayanti (2016), Rahman & Bukair (2013), dan Setiawan, Panduwangi, & Sumintono (2018) dalam penelitiannya memaparkan bahwa Dewan pengawas syariah diukur dengan :

1. Jumlah anggota Dewan

2. Tingkat pendidikan DPS, yaitu Doktor diberi skor 3, Magister diberi skor 2, lainnya diberi skor 1

3.3.4 Komite Audit

Menurut Tugiman (1995) Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Kholid & Bachtiar (2015) dalam penelitiannya komite audit diukur dengan jumlah komite audit. Agustina (2018) dalam penelitiannya memaparkan bahwa komite audit diukur dengan :

1. Jumlah komite audit.
2. Skor 1 = yang memiliki satu atau dua anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan Keuangan.

Skor 0 = tidak memiliki satu anggota komite audit yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan.

3.3.5 Dewan Direksi

Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan direksi akan diukur dengan dua skala pengukuran yaitu :

Azlina (2010) dalam penelitiannya memaparkan bahwa Jensen (1993)

mengukur dewan direksi dengan perusahaan yang mempunyai kurang dari tujuh orang (1-7) diberi skala 1 (diduga optimal dalam mengontrol manajemen), dan lebih dari tujuh orang diberi skala 0 (diduga tidak optimal dalam mengontrol manajemen).

Nugraheni & Muhammad (2019) dalam penelitiannya mengukur dewan direksi dengan, Doktor diberi skor 3, Magister diberi skor 2, lainnya diberi skor 1

3.3.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Karena biaya-biaya yang mengikuti penjualan cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba (Sidharta, 2000).

Besar kecilnya suatu perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya ukuran. Total aset perusahaan merupakan tolak ukur dari ukuran perusahaan. Kekayaan perusahaan digambarkan oleh total aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan menggunakan proksi logaritma natural dari total aset. Total aset akan berdistribusi normal jika dikonversikan ke dalam bentuk logaritma natural. Menggunakan function di excel = Ln (kolom A atau total aset) akan ditemukan nilai Ln size untuk mendapatkan nilai logaritma natural, yang dipaparkan oleh Klapper dan Love (2002) dalam Natalia (2012).

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi umum dari variabel penelitian, yaitu gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata,

standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2013).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui hasil regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi maka perlu menggunakan uji asumsi klasik. Jika sudah memenuhi persyaratan best linear unbiased estimator maka model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias, yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi.

Varian tidak konstan dapat menyebabkan biasanya standar error, jika terdapat heteroskedastisitas. Tingkat signifikan koefisien regresi menjadi rendah, jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individu dari variabel.

Jika menggunakan analisis regresi linear maka pengujian asumsi klasik merupakan uji prasyarat. Pengujian ini meliputi :

3.4.2.1 Uji Normalitas

Ghozali (2013) menjelaskan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Ghozali (2013) menjelaskan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, dan pada tabel *Kolmogorov-smirnov* signifikansinya lebih dari 5% ($>0,05$) maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal dan pada tabel *Kolmogorov-smirnov* signifikansi kurang dari 5% ($< 0,05$) maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.4.2.2 Uji multikolinearitas

Ada atau tidaknya model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas adalah tujuan dari uji multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013).

Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance, salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Kriteria pengambilan keputusan dengan nilai tolerance dan VIF adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai tolerance $\geq 0,10$ atau nilai VIF ≤ 10 , berarti tidak terjadi multikolinearitas.
2. Jika nilai tolerance $\leq 0,10$ atau nilai VIF ≥ 10 , berarti terjadi multikolinearitas.

3.4.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013) dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode

t-1 adalah tujuan dari uji autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin Watson :

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi = 0, sehingga tidak ada autokorelasi, positif atau negatif.
2. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi > 0, sehingga ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar dari pada (4-dl), maka koefisien autokorelasi < 0, sehingga ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2013) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot dan uji statistik. Grafik Plot merupakan cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola teratur, maka telah

teridentifikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.3 Regresi Linear Berganda

Peneliti menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda dilakukan terhadap model yang diajukan menggunakan *software* SPSS dan digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu kualitas audit (KA), dewan pengawas syariah (DPS), dewan direksi (DD), pengungkapan corporate governance (CGD) dan Investasi Mudharabah (UIAH) terhadap fungsi audit internal (FAI) sebagai variabel dependen. Persamaan Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$FAI = a + \beta_1 KA + \beta_2 DPS + \beta_3 DD + \beta_4 CG + \beta_6 SIZE + s$$

Keterangan

FAI = Fungsi Audit Internal

a = Konstanta

β_n = Parameter yang mencerminkan koefisien regresi variabel ke n

KA = Komite Audit

DPS = Dewan Pengawas Syariah

DD = Dewan Direksi

CGD = Pengungkapan Islamic Corporate Governance

SIZE = Ukuran Perusahaan

s = Error

3.4.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan asumsi yang telah dibuat apakah diterima atau ditolak.

3.4.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Kaidah pengujian dalam uji signifikansi parsial (uji t) berdasarkan perbandingan antara t tabel dan t hitung, yaitu (Siregar, 2013) :

1. Jika $t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}}$, maka H_0 diterima
2. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak Pengambilan keputusan mengenai hipotesis dengan didasarkan pada angka probabilitas signifikansi, yaitu :
 - a. Apabila ($\text{Sig} \leq \alpha$), nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
 - b. Apabila ($\text{Sig} > \alpha$) nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

3.4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Kaidah pengujian dalam uji signifikansi simultan (uji F) berdasarkan perbandingan F tabel dan F hitung, yaitu : (Siregar, 2013)

1. Jika $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima.
2. Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak. Dan berdasarkan nilai probabilitas, dengan melihat nilai signifikansi ($\text{sig} < 0,05$ atau 5%). Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak, sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima.

3.4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Ghozali (2013) memaparkan setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti

menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R2* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti *R2*. Nilai *Adjusted R2* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran umum sampel data. Hasil statistik deskriptif dari sampel data penelitian dapat dilihat melalui jumlah data, rata-rata sampel dan standar deviasi.

Tabel 4.1

Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Fungsi Audit Internal	165	12	14	12,8	0,35
Pengungkapan Islamic Corporate Governance	165	4	5	4,61	0,08
Dewan Pengawas Syariah	165	3	8	5,55	0,77
Komite Audit	165	3	9	5,07	1,07
Dewan Direksi	165	1,5	4,6	3,08	0,54
Ukuran Perusahaan	165	3	5	4,45	0,20

Berdasarkan dari hasil pengujian (lihat tabel 4.1) dapat dianalisis bahwa. Fungsi audit internal memiliki nilai rata-rata sebesar 12,80 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,35. Fungsi Audit Internal memiliki batas maksimum 14 dan memiliki batas minimum sebesar 12. Pengungkapan Islami Corporate Governance memiliki nilai rata-rata sebesar 4,61 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,08. Pengungkapan Islamic Corporate Governance memiliki batas maksimum 5 dan memiliki batas minimum 4. Dewan Pengawas Syariah Governance memiliki nilai rata-rata sebesar 5,55 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,77. Dewan Pengawas Syariah memiliki batas maksimum 8 dan memiliki batas minimum 3. Komite Audit memiliki nilai rata-rata sebesar 5,07 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,07. Komite Audit memiliki batas maksimum 9 dan memiliki batas minimum 3. Dewan Direksi memiliki nilai rata-rata sebesar 3,08 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,54. Dewan Direksi memiliki batas maksimum 4,60 dan memiliki batas minimum 1,5. Ukuran Perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,45 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,20. Ukuran Perusahaan memiliki batas maksimum 5 dan memiliki batas minimum 3.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi yang baik harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi klasik dalam modelnya. Jika masih terdapat asumsi klasik maka model regresi tersebut masih memiliki bias. Pengujian asumsi klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

4.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2008). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF dan tolerance.

Dari hasil uji multikolinearitas (lihat tabel 4.2) dapat diketahui bahwa semua variabel mempunyai nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengungkapan Islamic Corporate Governance	0,94	1,06
Dewan Pengawas Syariah	0,82	1,21
Komite Audit	0,87	1,15
Dewan Direksi	0,75	1,33
Ukuran Perusahaan	0,65	1,52

4.2.2 Uji Autokorelasi

Ghozali (2008) menjelaskan bahwa apakah dalam model regresi linear ada korelasi pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-

1, yang merupakan tujuan dari uji autokorelasi. Dalam penelitian ini akan menggunakan uji durbin watson untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Dari hasil uji autokorelasi (lihat tabel 4.3) diketahui nilai d dari hasil regresi adalah 1,141. Maka nilai d (Durbin Watson) sebesar 0,435 terletak pada daerah $-2 < 0,435 < 2$. Kesimpulannya yaitu tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

Tabel 4.3
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	0,384 ^a	0,147	0,120	0,333	0,435

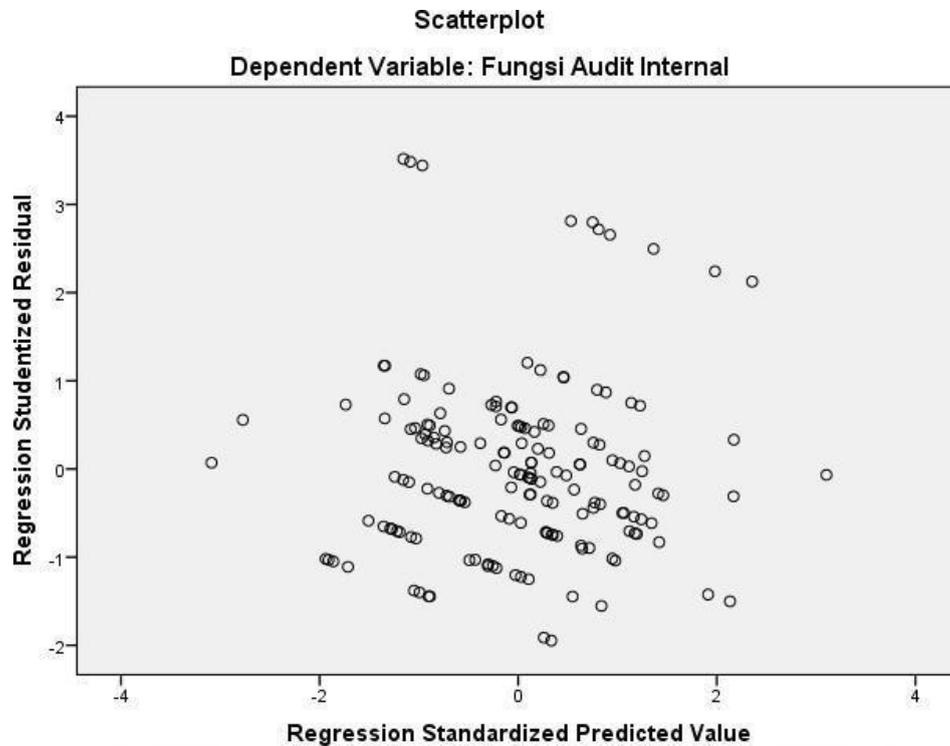
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual antara yang satu dengan yang lain (Ghozali, 2008). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik heteroskedastisitas antara nilai prediksi variabel dependen dengan variabel independen.

Dari hasil uji heteroskedastisitas (lihat gambar 4.1) dapat diketahui bahwa titik-titik scatterplot menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka dapat disimpulkan pada model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Gambar 4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Gletser bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya adalah :

1. Tidak terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.
2. Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 4.4

Coefficients

Model	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constan)	0,135	1,067		0,126	0,900
Pengungkapan Islami Corporate Governance	0,032	0,232	0,011	0,137	0,891
Dewan Pengawas Syariah	0,012	0,025	0,042	0,480	0,632
Komite Audit	0,007	0,018	0,034	0,396	0,693
Dewan Direksi	-0,022	0,037	-0,054	-0,587	0,558
Ukuran Perusahaan	-0,017	0,108	-0,016	-0,161	0,873

a. Dependen Variabel : abs_res

Berdasarkan uji heterokedstisitas (lihat tabel 4.4) dengan metode gletser diperoleh hasil Pengungkapan Islami Corporate Governance dengan nilai signifikansi 0,891. Dewan Pengawas Syariah dengan nilai signifikansi 0,632. Komite Audit dengan nilai signifikansi 0,693. Dewan Direksi dengan nilai signifikansi 0,558. Ukuran Perusahaan dengan nilai signifikansi 0,873. Semua nilai signifikansi setiap variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heterokedstisitas.

4.2.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data residual memenuhi asumsi normalitas jika memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 (Ghozali, 2008). Distribusi normal dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan analisis statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas (tabel

4.5) diketahui bahwa semua variabel menunjukkan angka Monte Carlo Sig (2-tailed) yaitu 0,07 yang berarti $>0,05$. Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat bahwa sebaran data menyebar di sekitar garis dan mengikuti arah garis. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memenuhi uji normalitas.

Tabel 4.5

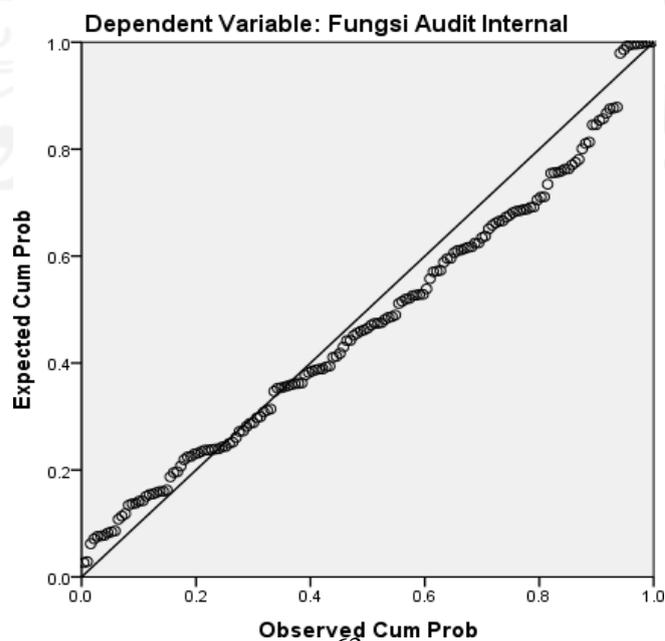
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		165	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.32810473	
Most Extreme Differences	Absolute	.099	
	Positive	.099	
	Negative	-.052	
Test Statistic		.099	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.070 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.063
		Upper Bound	.076

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen yaitu pengungkapan islami corporate governance, dewan pengawas syariah, dewan direksi, komite audit terhadap fungsi audit internal dengan variabel kontrol ukuran perusahaan.

4.3.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness of-fit dari model regresi, yaitu seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengujian koefisien determinasi (lihat tabel 4.6) dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,120 hal ini berarti 12% variabel dependen (profitabilitas) dapat dijelaskan oleh variabel independen (perputaran piutang, perputaran kas, perputaran aset, perputaran modal kerja, perputaran aset tetap). Sedangkan sisanya 88% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Tabel 4.6

Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,384 ^a	0,147	0,120	0,333

4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dari hasil uji F (lihat tabel 4.7) dapat diketahui

bahwa nilai F hitung sebesar 5,489 dengan taraf signifikansi pada 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga variabel-variabel pengungkapan islamic corporate governance, dewan pengawas syariah, komite audit, dewan direksi dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Tabel 4.7

Hasil Uji F Anova^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3,047	5	0,609	5,489	0,000 ^b
Residual	17,655	159	0,111		
Total	20,702	164			

4.3.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 4.8

Hasil Uji t Coefficients^a

Variabel	B	Std. Error	T	Sig.	Ket.
Konstan	15,208	1,570	9,687	0,000	

Pengungkapan Islamic Corporate Governance	-0,214	0,314	-0,626	0,532	Tidak Signifikan
Dewan Pengawas Syariah	-0,108	0,037	-2,904	0,004	Signifikan
Komite Audit	0,040	0,026	1,529	0,128	Tidak Signifikan
Dewan Direksi	-0,168	0,055	-3,046	0,003	Signifikan
Ukuran Perusahaan	-0,115	0,159	-0,719	0,473	Tidak Signifikan

Berdasarkan hasil persamaan regresi (lihat tabel 4.8) dapat diinterpretasikan bahwa nilai konstanta sebesar 15,208 berarti apabila tidak ada variabel pengungkapan islamic corporate governance, dewan pengawas syariah, komite audit, dewan direksi, ukuran perusahaan maka tingkat fungsi audit internal sebesar 15,208

Pengungkapan islamic corporate governance memiliki koefisien regresi sebesar -0,214. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan islamic corporate governance memiliki nilai signifikan sebesar 0,532. Ini menunjukkan bahwa pengungkapan islamic corporate governance tidak berpengaruh terhadap fungsi audit internal.

Dewan pengawas syariah memiliki koefisien regresi sebesar -0,108. DPS

memiliki nilai signifikan sebesar 0,004, artinya bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap fungsi audit internal. Komite audit memiliki koefisien regresi sebesar 0,040. Komite audit memiliki nilai signifikan sebesar 0,128, artinya bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap fungsi audit internal. Dewan direksi memiliki koefisien regresi sebesar -0,168. Dewan direksi memiliki nilai signifikan sebesar 0,003, artinya bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap fungsi audit internal.

Ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan memiliki koefisien regresi sebesar -0,115. Ukuran perusahaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,473, artinya bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap fungsi audit internal.

4.4 Pembahasan

Pengungkapan islamic corporate governance mempunyai koefisien regresi sebesar -0,214, ini menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan sebanyak 1% akan menurunya fungsi audit internal sebanyak 21,4%. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,532 atau lebih besar dari 0,05 (5%) artinya adalah pengungkapan islamic corporate governance tidak berpengaruh terhadap fungsi audit internal pada bank syariah dan unit usaha syariah periode 2015 - 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi atau rendahnya pengungkapan islamic corporate governance tidak memengaruhi fungsi audit internal, dengan demikian hipotesis (H1) ditolak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suharni & Astuti (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari ICG terhadap kinerja perbankan.

Dewan pengawas syariah mempunyai koefisien regresi sebanyak -0,108,

menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan sebesar 1% akan menurunnya fungsi audit internal sebanyak 10,8%. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikan sebanyak 0,004 atau lebih kecil dari 0,05 (5%) menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah mempunyai pengaruh negatif signifikan dengan fungsi audit internal pada bank syariah dan unit usaha syariah periode 2015 - 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dewan pengawas syariah berbanding terbalik terhadap fungsi audit internal yang artinya bahwa setiap kenaikan yang terjadi pada nilai dewan pengawas syariah yang diukur dengan menggunakan jumlah dan tingkat pendidikan dewan pengawas syariah, maka akan menurunkan fungsi audit internal sebaliknya, apabila terjadi penurunan terhadap nilai dewan pengawas syariah, maka akan meningkatkan fungsi audit internal dengan demikian hipotesis (H2) ditolak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sulub, dkk (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari dewan pengawas syariah terhadap fungsi audit internal.

Komite audit mempunyai koefisien regresi sebanyak 0,040, menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan sebanyak 1% akan menurunnya fungsi audit internal sebanyak 4%. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikan sebanyak 0,128 atau lebih besar dari 0,05 (5%) menunjukkan bahwa komite audit tidak mempunyai pengaruh dengan fungsi audit internal pada bank syariah dan unit usaha syariah periode 2015 - 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi atau rendahnya penilaian terhadap komite audit yang diukur dengan menggunakan jumlah dan latar belakang pendidikan, tidak memengaruhi fungsi audit internal, dengan demikian hipotesis (H3) ditolak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Azizah & Erinosa (2020) menyatakan bahwa komite audit

tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap fungsi audit internal.

Dewan direksi mempunyai koefisien regresi sebanyak -0,168, menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar 1% akan menurunkan fungsi audit internal sebanyak 16,8%. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikan sebanyak 0,004 atau lebih kecil dari 0,05 (5%) yang menunjukkan bahwa dewan direksi mempunyai pengaruh negatif signifikan dengan fungsi audit internal pada bank syariah dan unit usaha syariah periode 2015 - 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dewan direksi berbanding terbalik terhadap fungsi audit internal yang artinya bahwa setiap kenaikan yang terjadi pada nilai dewan direksi yang diukur dengan menggunakan jumlah dan tingkat pendidikan dewan direksi, maka akan menurunkan fungsi audit internal sebaliknya, apabila terjadi penurunan terhadap nilai dewan pengawas syariah, maka akan meningkatkan fungsi audit internal dengan demikian hipotesis (H4) ditolak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Warouw,dkk (2018) menyatakan bahwa Dewan direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap fungsi audit internal.

Variabel kontrol ukuran perusahaan mempunyai koefisien regresi sebanyak - 0,115, menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan sebanyak 1% akan menurunnya fungsi audit internal sebanyak 11,5%. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikan sebanyak 0,473 atau lebih besar dari 0,05 (5%) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh dengan fungsi audit internal pada bank syariah dan unit usaha syariah periode 2015 – 2019.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen yaitu corporate governance yang diwakili dengan islamic corporate governance, DPS, komite audit, dewan direksi terhadap fungsi audit internal dan dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang diambil secara *purposive sampling* dari tahun 2015 sampai 2019.

Secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa islamic corporate governance, dewan pengawas syariah, komite audit, dewan direksi dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan yaitu dewan pengawas syariah dan dewan direksi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap fungsi audit internal. Variabel Pengungkapan Islamic Corporate Governance, komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap fungsi audit internal.

5.2 Implikasi Penelitian

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dalam penelitian ini adalah secara parsial corporate governance yang diproksikan dengan pengungkapan islamic corporate

governance, dewan pengawas syariah, komite audit, dewan direksi dan ukuran perusahaan dapat memengaruhi fungsi audit internal. Proporsi pengungkapan islamic corporate governance, dewan pengawas syariah, komite audit, dewan direksi dan ukuran perusahaan yang seimbang akan melancarkan aktivitas fungsi audit internal. Dengan adanya fungsi audit internal dan struktur organisasi yang berjalan dengan baik dalam perusahaan diharapkan akan membantu perusahaan untuk menerapkan tata kelola yang efektif dan efisien bagi perusahaan dan dapat menciptakan good corporate governance.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis dalam penelitian ini adalah dapat dijadikannya acuan oleh perusahaan-perusahaan lain terhadap strategi bisnis, dengan memahami seluk beluk corporate governance dan fungsi audit internal, memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang dapat memengaruhi bisnis perusahaan sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan.

5.3 Saran Penelitian

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Bank Syariah & Unit Usaha Syariah

Bank umum syariah & unit usaha syariah mampu memfungsikan setiap divisi yang ada dalam manajemen perusahaan dengan baik, hal ini dikarenakan agar dapat menciptakan tata kelola yang baik.

2. Bagi Pemerintah

Peran pemerintah dalam hal ini adalah memberikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap tata kelola bank umum syariah dan unit usaha syariah.

3. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian mengenai pengaruh corporate governance yang diproksikan dengan pengungkapan islamic corporate governance, dewan pengawas syariah, komite audit, dewan direksi, ukuran perusahaan terhadap fungsi audit internal masih jarang dilakukan penelitian. Perlu pengembangan dari segi variabel penelitian dan sampel penelitian. Menambahkan pengujian teori fungsi audit internal secara menyeluruh.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya :

1. Item-item pengungkapan Islamic Corporate Governance dan Islamic Social Reporting yang digunakan tidak memisahkan antara aspek yang wajib untuk diungkapkan (mandatory) dan aspek yang bersifat sukarela.
2. Teori yang digunakan hanya satu, yaitu teori agensi.
3. Variable independen yang digunakan hanya Pengungkapan Islami Corporate Governance, Dewan Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, A. (2018). Pengaruh Peran Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Earnings Management Perbankan Syariah Di Indoensia Tahun 2012-2015. Unpublished Tesis. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ardi, M. (2017). Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance Di Perbankan Syariah. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol.15 No.2.Changwony.
- Astuti, N. T., & Suharni, S. (2020). Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Corporate Social Responsibility, Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Ilmu IlmuAkuntansi*, Volume 1 Nomor 1.
- Azizah, J., & Erinoss, N. R. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol.2 No.1.
- Azlina, N. (2010). Analisis Faktor Yang memengaruhi Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI). *Pekbis Jurnal*, Vol.2, No.3, November 2010: 355-363.
- Boediono, G. S. (2005). *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Artikel yang dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 8, 2005, Solo.
- Changwony, M. K., & Rotich, G. (2015). Role Of Internal Audit Function In Promoting Effective Corporate Governance Of Commercial Banks In Kenya. *International Journal of Business & Law Research*, Vol.3 No.1.

- Eisenhardt, K. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review*. 14. Hal 57-74.
- Elder, R. J., Beasley, M. S., Arens, A. A., & Jusuf, A. A. (2011). *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta : Salemba Empat.
- Endraswati, H. (2018) Gender Diversity in Board of Directors and Firm Performance: A Study in Indonesia Sharia Banks. *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol.7 No.1.
- Ermawati, L., Devi, Y., & Arramadani, N. N. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII). *Jurnal Akuntansi Keuangan*, Vol.11 No.1.
- Fakhrunnas, F., & Ramly, Z. (2017). Board of Directors and Risk-taking Behavior of Islamic Banks in South East Asia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review* Vol.10 No.2.
- Femiarti, R., & Dewayanto, T.. (2012). Audit Committee Financial Experts, Internal Audit, Dan Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1-14
- Firdaus, M. (2007). *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2001). *Seri Tata Kelola (Corporate Governance) Jilid II*. Jakarta.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hartawati, E., Sulindawati, N. L. G. E., Kurniawan, P. S. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kinerja Sosial, Kinerja Lingkungan Dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii) Periode Tahun 2014- 2016. *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.8 No.2.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan. PSAK Cetak Keempat Buku Satu*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2001). *Standar Profesi Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba empat.
- Ikatan Komite Audit Indonesia. (2010). Komite Audit. Diakses Juli 2020, <https://ikai.co.id>
- Indarti,, Apriliani, I. B., & Aznuriyandi. (2018). The Effect of Audit Quality And Company Size on Good Corporate Governance Disclosure in Banking Companies Listed in Indonesia Stock Exchan. *Earth and Environmental, Science* Vol.175.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol.19 No.2.
- Khotimah, H. (2019). Pengaruh Profesionalisme Syariah Supervisory Boards (SSB) terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*,

Vol. 2 No.2.

- Lesmana, S. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pengendalian Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Syariah Kantor Wilayah Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.19 No.1.
- Lestari, I. F., & Oktaviana, U. K. (2020). Peranan Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. Vol.8 No.1.
- Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol.9 No.2.
- Mulyadi. (2002). *Auditing Edisi Keenam Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi. (2010). *Auditing Edisi Ketujuh*. Jakarta: Salemba Empat.
- Natalia, P. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Pengungkapan Corporate Governance Dalam Laporan Tahunan. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 1. No. 2. Hal. 1-10.
- Nasrum, M., & Akal, A. T. U. (2018). Corporate Governance (Konsep, Teori dan Aplikasi di Beberapa Negara Asia). Diakses Juli 2020, <https://doi.org/10.31227/osf.io/zpfnx>.
- Nugraheni, P., & Muhammad, R. (2019) Board of directors and credit risk An empirical study of Indonesian Islamic banks. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.23 No.4.
- Purnamasari, L., Hidayati, N., & Amin, M. (2020). Fungsi Audit Internal Dan Pengendalian Internal Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance. (*E-JRA*) *E-Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*,

Vol.9 No.6.

- Rahmat, B. Z.. (2017). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Di BPRS Harum Hikmahnugraha. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1 No.2.
- Restuningdiah, N. (2010). Komisaris Independen, Komite Audit, Internal Audit Dan Risk Management Committee Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol.15, No.3 hlm. 351–362.
- Rismayani, G., & Nanda, U. L. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi Terhadap Kinerja Maqasid Syariah. *E-Journal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 4 No.2.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen risiko Perbankan syariah*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Sawyer, D., & Scheiner. (2003). *Audit Internal Sawyer Buku 1 Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.
- Shleifer, A., & Vishny, R.W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, Vol. 52 (2), 737-783.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Sulub, S. A., Salleh, Z., & Hashim, H. A. (2018). Corporate governance, SSB strength and the use of internal audit function by Islamic banks Evidence from Sudan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 11 No.1.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

- Tugiman, H. (1995). *Komite audit, PT. Eresco, Bandung, Sekilas : Komite Audit*.
Bandung : Eresco.
- Tugiman, H. (2006). *Standar Profesi Internal Audit*. Jakarta : Eresco.
- Utama, S. (2000). Teori dan Riset Akuntansi Positif : Suatu Tinjauan Literatur.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, No. 1. hal. 83-96.
- Wahyudi, I., Dewi, M. K., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Surya, N. I. (2013).
Manajemen Risiko Bank Islam. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Warouw, C. V., Tommy, P., & Arie, F. V.. (2018). Pengaruh Struktur Kepemilikan
Dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perbankan Pada Bank
Pembangunan Daerah Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal EMBA (Jurnal
Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi)*, Vol.6 No.1.
- Wirduyaningsih, N., Gemala, D., & Berlianti, S.Y. (2005) *Bank dan Asuransi Islam
di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pranada Media.
- Yanti, D. (2015). Pengaruh Kualitas Audit, Kinerja Keuangan, Dan Ukuran
Perusahaan Terhadap Pengungkapan Good Corporate Governance Pada
Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah
Ekonomi Global Masa Kini*, Vol.6 No.1.
- Zulpahmi., Sumardi., Andika. (2018). Dana Syirkah Temporer Dan Corporate
Governance Mechanism memengaruhi Kinerja Maqasid Syariah Bank
Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol.11 No.1.